

**PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN TATA KELOLA SEBAGAI PEMODERASI**
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2016-2019)



Oleh :

Mohammad Suryahadi Rahman

18919015

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
AGUSTUS 2022**

**PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN TATA KELOLA SEBAGAI
PEMODERASI**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2016-2019)

Tesis S-2
Program Magister Akuntansi



Oleh :

Mohammad Suryahadi Rahman

18919015

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
AGUSTUS 2022**

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MOHAMMAD SURYAHADI RAHMAN

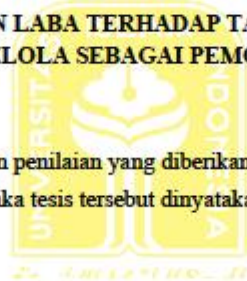
No. Mhs. : 18919015

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TATA KELOLA SEBAGAI PEMODERASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Penguji II

Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Drs. Chaitisah, S.Si., M.Com., Ph.D., CfrA.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 18 Agustus 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atama', is written over the name of the supervisor.

Dra. Atama Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kasih sayang Allah SWT kepada setiap hamba-Nya yang memberikan kelapangan dari setiap kesulitan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan ummatnya dalam nilai-nilai keislaman. Tesis yang penulis susun ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya motivasi, semangat dan juga doa dari semuanya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini. Berkenaan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dekar Urumsah, SE, S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFrA. Selaku Ketua Prodi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Ataina Hidayati, Ak., M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan serta nasehat selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Ngadirin Setiawan, Ibu Tutuk Ningsih, serta Kakak-kakak saya, terima kasih selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi dan juga semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Istri Dona Fridayana dan Anak Naomi Nayyara Almahyra, yang telah memberikan semangat, kepercayaan, motifasi, dan kasih sayang yang indah tak terlupakan sepanjang hidup saya.

6. Bapak/Ibu Dosen Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu selama masa perkuliahan yang Insya Allah akan bermanfaat hingga nanti.
7. Rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah menemani masa perkuliahan saya di Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan tesis ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Di akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Penulis

Mohammad Suryahadi Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	12
2.1.3 Manajemen Laba	13
2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)	14
2.2 Penelitian Terdahulu	18

2.3 Pengembangan Hipotesis	23
2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak	23
2.3.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	24
2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	25
2.3.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi	26
2.3.5 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi	27
2.4 Rerangka Penelitian.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Populasi dan Sampel	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
3.3.1 Variabel Dependen	31
3.3.2 Variabel Independen	31
3.4 Metode Analisis Data	34
3.4.1 Analisis Deskriptif	34
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	34
3.4.3 Uji Normalitas	35
3.4.4 Uji Multikolinieritas	35
3.4.5 Uji Autokolerasi	35
3.4.6 Uji Heteroskedastisitas	36
3.5 Uji Hipotesis.....	37
3.5.1 Koefisien Determinasi	38
3.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	38

3.5.3 Uji Interaksi	39
BAB IV.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Analisis Statistik	41
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian	41
4.1.2 Analisis Deskriptif	41
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	43
4.2 Pembahasan.....	54
4.2.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak	54
4.2.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	55
4.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	56
4.2.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi	57
4.2.5 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi	58
 BAB V	 60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Implikasi	61
5.3 Saran	62
5.4 Keterbatasan Penelitian	63
 DAFTAR PUSTAKA.....	 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	42
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	44
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis	48
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	51
Tabel 4. 7 Koefisien Moderasi Hipotesis 4	53
Tabel 4. 8 Koefisien Moderasi Hipotesis 5	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian	28
Gambar 4. 1 Diagram Scatter Plot	47

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan tata kelola sebagai variabel moderasi. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 125 perusahaan menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur pada periode 2016-2019. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Komite audit dan proporsi dewan komisaris independen (*variabel moderating*) dapat memperlemah hubungan manajemen laba terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kata kunci: *Manajemen Laba, Tata Kelola, Penghindaran Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of earnings management on tax avoidance with governance as a moderating variable. The subjects in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. In this study, a sample of 125 companies used documentation techniques by collecting annual financial statement documents for manufacturing companies in the 2016-2019 period. Based on the analysis that has been done, the results show that earnings management has a positive and significant effect on the tax avoidance variable, while the proportion of independent commissioners and audit committees has a negative and significant effect on the tax avoidance variable. The audit committee and the proportion of independent commissioners (moderating variables) can weaken the relationship between earnings management and tax avoidance.

Keywords: *Earnings Management, Corporate Governance, Tax Avoidance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya nilai pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri baik dalam membiayai pengeluaran, pembangunan, maupun biaya rutin Negara. Oleh karena sejak tahun 2002 dilakukan perbaikan sistem pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak (Tandilino, 2016). Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa kontribusi pajak pada APBN 2021 mencapai 103,9%, tumbuh sebanyak 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang pajak pada APBN 2021 adalah sektor industri manufaktur. Kementerian Perindustrian menyampaikan sumbangsih industri pengolahan sepanjang tahun 2021, berkontribusi sebesar 29%.

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang beraktivitas mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, bahan baku menjadi bahan setengah jadi, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak permintaan pasar, semakin banyak pula proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Semakin tinggi nilai perusahaan, citra perusahaan akan semakin baik. Demikian juga semakin tinggi nilai perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham (Nurchayono, 2021). Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada 3

sektor yaitu industri dasar dan kimia, industry aneka, dan industri barang konsumsi. Dari ketiga sektor tersebut, jumlah keseluruhan perusahaan manufaktur di Indonesia yang tercatat di BEI cukup banyak.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak. Logikanya, semakin besar perusahaan, semakin tinggi pajak yang ditanggungnya. Namun, sering kali terdapat konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, dan wajib pajak cenderung mengurangi pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak berusaha untuk membayar pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham, mengurangi risiko pengawasan pajak, dan menimbulkan biaya politik (Tang & Firth, 2011).

Kecenderungan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak menunjukkan ketidaksenangan membayar pajak. Hal ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung terhadap pembayar pajak (Mangoting dalam Sibarani, 2018). Hoque dkk dalam Sibarani (2018), penelitiannya menemukan mengapa seseorang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, yaitu: Kualitas pengembalian pajak buruk; Berbagai sistem perpajakan dan konsep keadilan. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga publik. Tingkat korupsi yang tinggi; ada kesenjangan dalam undang-undang perpajakan dan peraturan keuangan yang lemah. Biaya kepatuhan tinggi. Penegakan pajak yang lemah; Penagihan pajak yang tidak tepat; Kemampuan yang lemah untuk mendeteksi dan menuntut penegakan pajak yang sewenang-wenang. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Tarif pajak yang tinggi; dan administrasi perpajakan yang lemah.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan (Pohan, 2017). *Tax avoidance* dianggap sebagai suatu upaya penghindaran pajak yang legal namun tidak etis karena akan cenderung merugikan sejumlah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah.

Penghindaran pajak merupakan hal yang lumrah di Indonesia, salah satunya adalah manufaktur. Contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terkait dengan praktik penghindaran pajak 1,3 miliar di tahun 2013. Dimulai dengan pendirian perusahaan baru dan pengalihan aset dan kewajiban PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perluasan usaha itu berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa jumlah pajak yang harus dibayar adalah \$1,3 miliar. Kasus selanjutnya adalah PT. Semen Baturaja Tbk, yang memiliki alat berat dan pajak, tidak membayar delapan alat berat pada Juli 2017. Estimasi nilai pasar alat berat, jumlah denda dan pajak sekitar 78 juta (Hariseno & Pujiono, 2021). Kasus berikutnya yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (anak perusahaan BAT) yang diduga telah melakukan penghindaran pajak dalam dua cara yaitu pembayaran bunga utang secara internal oleh perusahaan dan pembayaran biaya lisensi, biaya, dan biaya TI. Penyelesaian ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Dalam laporannya, Bentoel mengumumkan akan membayar bunga utang

sebesar US\$ 164 juta atau Rp 25 triliun untuk pinjaman dan loyalitas antar perusahaan, biaya TI, dan biaya kepada perusahaan induk BAT. Alhasil, rugi bersih yang ditanggung Bentoel kini menjadi 27%. Pemerintah Indonesia mengenakan pajak 20% atas pembayaran ini, tidak termasuk Belanda. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Bentoel mengkalinya dengan mengambil pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda. Bahkan, dana yang dipinjamkan ke Bentoel melalui rekening perusahaan Belanda berasal dari Pathway 4 (Jersey) Limited, anak perusahaan BAT di Inggris. Melalui program ini, Indonesia sebenarnya dapat menerima 20% dari US\$164 juta, atau US\$33 juta per tahun, atau US\$11 juta dalam penerimaan pajak. Skema transfer lain yang diterapkan Bentoel adalah pembayaran royalti, fee, dan tarif. Biaya yang dikeluarkan beberapa anak perusahaan BAT di Inggris sebesar US\$19,7 juta. Untuk meningkatkan pendanaan ini, Indonesia akan mengenakan pajak 25% untuk biaya lisensi, biaya, dan biaya TI. Namun karena adanya tax treaty antara Indonesia dan Inggris, pajak yang dibayarkan hanya 15%. Dengan sistem ini, Indonesia akan kehilangan pendapatan pajak tahunan sebesar US\$2,7 juta. (Nasional.kontan.co.id).

Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan terdapat beberapa faktor penghindaran pajak yang tidak konsisten terhadap pajak yaitu berkaitan dengan manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, komite audit. Penelitian menurut (Septiadi et al, 2017), (Rifai & Atiningsih, 2019), (Sofiya, 2019), dan (Kusuma, 2019) bahwa manajemen laba berpengaruh negatif, tetapi berbeda dengan penelitian (Pajriyansyah & Firmansyah, 2015) mengatakan bahwa hasil manajemen laba terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif. Dalam penelitian (Subagiastra

et al, 2016), (Wibowo et al, 2016), dan (Eksandy, 2017) mengatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan penelitian (Diantari & Ulupui, 2016), (Alam, 2019) mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Wibowo et al, 2016) dan (Sarra, 2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Asri & Suardana, 2016), (Diantari & Ulupui, 2016), (Adrisa, 2018), dan (Rista & Mulyani, 2019) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor pertama dalam penelitian ini terkait dengan penghindaran pajak adalah adanya manajemen penerimaan/laba. Manajemen hasil/laba adalah intervensi manajemen secara sadar dalam proses mencari keuntungan untuk mencapai keuntungan pribadi (Schipper dalam Septiadi et al, 2017). Intervensi ini merupakan upaya manajer untuk memengaruhi informasi dalam laporan keuangan. Munculnya praktik-praktik manajemen pendapatan yang memengaruhi pembayaran pajak bermotivasi pajak. Mengenai motivasi pajak, Scott dalam Septiadi et al. (2017) mempraktikkan manajemen pendapatan untuk memengaruhi tingkat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan mengurangi laba dan mengurangi beban pajak.

Faktor selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak adalah keberadaan komisaris independen. Menurut Fama & Jensen *dalam* Thesarani (2017) dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian internal tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh

manajemen puncak. Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak.

Faktor berikutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak yaitu komite audit. Komite audit berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja dan standar keuangan perusahaan, adanya pengawasan ini perusahaan akan berupaya untuk menghindari pajak (Ardianti, 2019). Menurut Yunawati (2021) adanya komite audit sangat dibutuhkan karena dapat membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan manajemen perusahaan, sehingga menjadi salah satu upaya perbaikan cara pengelolaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Variabel penyesuaian pertama untuk penelitian ini adalah komisaris independen. Memiliki pejabat independen di suatu perusahaan dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pemegang saham (Zhou dalam Sinaga & Suardikha, 2019). Sebuah studi oleh Wijayanti & Lely dalam Sinaga & Suardikha (2019) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pejabat independen meningkatkan

pengaruh pejabat independen terhadap pemantauan kinerja manajemen, dan manajemen berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Variabel pemoderasi yang kedua yaitu komite audit. Komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pelaksanaan audit di perusahaan yang bekerja secara profesional dan independen (Effendi dalam Adrisa, 2018). Berjalannya komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mengawasi kinerja manajemen dalam mengambil keputusan dan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

Komisaris independen dan komite audit merupakan bagian yang mempunyai peran sangat penting dalam perusahaan. Keberadaan keduanya mampu memengaruhi biaya perpajakan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan laba yang diterima perusahaan. Banyaknya kasus *tax avoidance* khususnya dalam industri manufaktur, menjadi alasan untuk dilakukan penelitian. Terlebih lagi, penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi hasil, maka eksplorasi terhadap pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan tata kelola sebagai variabel pemoderasi masih diperlukan. Oleh karena itu, peneliti hendak melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan tata kelola sebagai variabel pemoderasi dengan periode penelitian yang terbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan memberi gambaran mengenai pengaruh proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, terkhusus perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan untuk menjadi acuan dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan serta meningkatkan pengawasan kepada

perusahaan, sehingga meminimalkan kesempatan untuk melakukan perilaku penghindaran pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Keputusan manajer untuk menghindari pajak mungkin didasarkan pada kepentingan pribadi manajer (seperti kepentingan keuntungan yang tinggi). Namun, keputusan ini mungkin tidak untuk kepentingan pemegang saham. Administrator dapat membuat keputusan penghindaran pajak hanya atas dasar keuntungan jangka pendek. Pemegang saham, di sisi lain, akan melihatnya dalam hal keuntungan jangka panjang. Disinilah masalah keagenan muncul, di mana kepentingan manajemen berbeda dengan kepentingan pemegang saham (Wahyudi dalam Sarra, 2017). Koordinasi hubungan antara pemegang saham dan direksi perusahaan memengaruhi kebijakan perpajakan yang berlaku.

Teori keagenan menjelaskan bagaimana tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki manfaat yang berbeda sehingga menimbulkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Prinsipal dan agen sebagai pemegang saham yang mendanai operasional perusahaan bertindak sebagai manajer perusahaan yang melaporkan pekerjaannya kepada pemegang saham. Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua manusia memiliki sifat egois yang mementingkan kepentingan pribadi individu (Melisa & Tandean, 2015). Menurut Scott (2015) konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk

kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Benturan kepentingan seringkali terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Perbedaan pemikiran antara manajer dan pemegang saham dalam mengendalikan perusahaan menyebabkan pihak manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal*, sehingga menyebabkan konflik keagenan (Lestari & Ningrum, 2018). Konflik ini dapat terjadi karena pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Wijayani (2016) menyebutkan bahwa *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi atau meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Pohan (2016) upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan

dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, Komisi Pajak *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik (Tendean, 2016).

- a) Adanya unsur *artificial arrangement*, karena kurangnya elemen kontrol.
- b) Seringnya eksploitasi celah hukum atau penerapan hukum untuk berbagai tujuan.
Ini sebenarnya bukan niat pembuat undang-undang.
- c) Penasehat pajak badan biasanya memiliki unsur rahasia tentang bagaimana wajib pajak dapat menghindari perpajakan, asalkan mereka menjaga kerahasiaan.

2.1.3 Manajemen Laba

Menurut Wirakusuma (2016) manajemen laba adalah suatu proses yang disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Menurut Novitasari dalam Alam (2019) manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka panjang. Menurut Schipper dalam (Astari & Suryanawa, 2017), manajemen laba merupakan suatu kondisi di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan

keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba.

Munculnya praktik-praktik manajemen pendapatan yang memengaruhi pembayaran pajak bermotivasi pajak. Mengenai motivasi pajak, Scott dalam Septiadi et al. (2017) mempraktikkan manajemen pendapatan untuk memengaruhi tingkat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan mengurangi laba dan mengurangi beban pajak.

Semakin tinggi manajemen laba suatu perusahaan, semakin besar konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Lestari & Ningrum (2018) menjelaskan manajemen laba merupakan upaya manajemen perusahaan untuk mengelola informasi keuangan tentang kinerja perusahaan dan kondisi yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan. Pada kenyataannya, manajemen dimotivasi oleh kompensasi. Bonus gaji atau promosi, untuk mencapai keuntungan pribadi jika imbalan ini diberikan untuk pengembangan keuntungan perusahaan. Dengan adanya insentif bagi manajemen ini, manajemen tergoda untuk mengambil tindakan atas inisiatif mereka sendiri dan mengesankan pemangku kepentingan dengan kinerja superior yang tercermin dari manajemen laba.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut Cadbury dalam Nurhidayah (2020) *Corporate Governance* didefinisikan sebagai kegiatan yang mengacu dan mengawasi perusahaan hingga mencapai antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Mekanisme *corporate*

governance yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Menurut Nurhidayah (2020) *corporate governance* adalah sebuah struktur yang menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien melalui harmonisasi manajemen perusahaan. *Corporate governance* berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Dalam menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak, penelitian ini akan berfokus pada latar belakang proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

2.1.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Ginting (2016) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terhubung dengan anggota dewan komisaris lain, direksi, dan pemegang saham, bebas dari hubungan bisnis lainnya yang akan memengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan di luar kepentingan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abduh & Ellen (2018) menyatakan bahwa secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya apabila peran dewan komisaris berjalan dengan baik, maka pengawasan kinerja manajerial perusahaan akan semakin baik sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada Otoritas Jasa Keuangan (2014), jumlah proporsional komisaris independen dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Penelitian Chen et al (2020) pengawasan oleh komisaris independen membatasi oportunistik manajer yang selanjutnya dapat memberi motivasi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang tepat.

Komisaris Independen terutama bertanggung jawab untuk memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam suatu organisasi dengan memungkinkannya melakukan pengawasan yang lebih efektif. Jumlah direktur independen perusahaan dapat memungkinkan pemantauan lebih dekat terhadap kinerja manajemen. Selain itu, keberadaan agen independen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dilaporkan manajemen.

Sembiring & Fransiska (2021) semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris di suatu perusahaan, maka akan semakin mudah mengendalikan *Chief Executive Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

Anabella (2022) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.1.4.2 Komite Audit

Komite audit menurut Fadhilah *dalam* Dewi (2019) adalah komite yang profesional dan independen menjalankan tugasnya membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan. Keberadaan komite audit sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat membantu dewan komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Keanggotaan komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Ridwan Pajriyansyah dan Amrie Firmansyah (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage ● Kompensasi Rugi Fiskal ● Manajemen Laba 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage dan Manajemen Laba berpengaruh positif ● Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh
2.	Komang Subagiastra, I Putu Edi Arizona, I Nyoman Kusuma, dan Adnyana Mahaputra (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas ● Kepemilikan Keluarga ● Kepemilikan Institusional ● Proporsi Dewan Komisaris Independen ● Komite Audit ● Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan ● Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan ● Kepemilikan Keluarga, Komite Audit, Kualitas Audit tidak berpengaruh
3.	Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporsi Komisaris Independen ● Komite Audit ● Preferensi risiko eksekutif ● Ukuran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Komite Audit, Preferensi risiko eksekutif, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan ● Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh

4.	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ● Komite Audit ● Proporsi Dewan Komisaris Independen ● Kepemilikan Institusional ● Ukuran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Komite Audit dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan ● Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan ● Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh
5.	Agung Wibawa, Wilopo, dan Yusri Abdillah (2016)	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporsi Dewan Komisaris Independen ● Komite Audit ● Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan ● Kualitas Audit tidak berpengaruh
6.	Hustna Dara Sarra (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Konservatisme Akuntansi ● Komite Audit ● Dewan Komisaris Independen 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan ● Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan ● Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh
7.	Arry Eksandy (2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Komisaris Independen ● Komite Audit ● Kualitas Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan ● Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan ● Komite Audit tidak berpengaruh
8.	Imron Septiadi, Anton Robiansyah, dan Eddy Suranta	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba ● Kepemilikan Institusional ● Kepemilikan Manajerial ● Komite Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba berpengaruh negatif ● Pengungkapan CSR berpengaruh positif

	(2017)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas Audit ● Pengungkapan CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh
9.	Rosy Amalia Rosyada (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ukuran Perusahaan ● Komite Audit ● Leverage ● Intensitas Modal ● Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage dan Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan ● Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan ● Ukuran Perusahaan dan Komite Audit tidak berpengaruh ●
10.	Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan Institusional ● Kepemilikan Manajerial ● Proporsi Dewan Komisaris ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan <p>Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh</p>
11.	Nurul Adrisa (2018)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan Hutang ● Intensitas Persediaan ● Intensitas Aset ● Komite Audit <p>Komite Audit (moderasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensitas Persediaan dan Komite Audit berpengaruh negatif ● Kebijakan Hutang dan Intensitas Aset tidak berpengaruh ● Intensitas Persediaan*Komite Audit berpengaruh positif ● Kebijakan Hutang*Komite Audit dan Intensitas Aset*Komite Audit

			tidak berpengaruh
12.	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage ● Profitabilitas ● Capital Intensity ● Manajemen Laba 	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas, Capital Intensity, dan Manajemen Laba berpengaruh negatif ● Leverage tidak berpengaruh
13.	Lia Kusuma Dewi, Anny Widiastara, dan Nik Amah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas ● Manajemen Laba ● CSR (moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas dan Manajemen Laba tidak berpengaruh
14.	Hadiratus Sofiya (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba ● Dewan Komisaris ● Komite Audit ● Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba dan Profitabilitas berpengaruh negatif ● Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh
15.	Henny (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba ● Leverage ● Size ● Capital Intensity 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage berpengaruh positif ● Manajemen Laba, Size, dan Capital Intensity tidak berpengaruh
16.	Marwah Hajar Alam (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba ● Likuiditas ● Leverage ● Komisaris Independen ● Komite Audit 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage berpengaruh positif ● Komisaris Independen berpengaruh negatif ● Manajemen Laba, Likuiditas, dan Komite Audit tidak berpengaruh
17.	Dewi Kusuma Wardani, Widyani Indah Dewanti, dan Nur Indah Permatasari (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba ● Umur Perusahaan ● Leverage 	<ul style="list-style-type: none"> ● Manajemen Laba berpengaruh negatif ● Umur Perusahaan dan Leverage tidak berpengaruh
18.	Cyntia Habibah Sinaga dan I Made Sadha Suardikha (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage ● Capital Intensity ● Proporsi Komisaris Independen (Moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage berpengaruh positif ● Capital Intensity berpengaruh negatif

			<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage*Proporsi Komisaris Independen dan Capital Intensity*Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh
19.	Tika Anggraini, Anny Widiasmara, dan Nik Amah (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Beban Pajak Tangguhan ● Komite Audit (Moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif ● Beban Pajak Tangguhan*Komite Audit berpengaruh negative
20.	Bunga Rista dan Susi Dwi Mulyani (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● Corporate Social responsibility ● Profitabilitas ● Komite Audit ● Komite Audit (Moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Corporate Social Responsibility dan Komite Audit berpengaruh negative ● Profitabilitas tidak berpengaruh ● Corporate Social Responsibility*Komite Audit berpengaruh positif ● Profitabilitas*Komite Audit tidak berpengaruh
21.	Jemima Christy dan Subagyo (2019)	<ul style="list-style-type: none"> ● ROA (Return Of Assets) ● Firm Size (Ukuran Perusahaan) ● Sales Growth (Pertumbuhan Penjualan) ● Komite Audit (Moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Firm Size berpengaruh negatif ● ROA dan Sales Growth tidak berpengaruh ● Firm Size*Komite Audit berpengaruh positif ● ROA*Komite Audit dan Sales Growth*Komite Audit tidak berpengaruh
22.	Mega Ernawati Christi Badoa	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage ● Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage, Profitabilitas,

	(2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporsi Komisaris Independen (Moderasi) 	Leverage*Proporsi Komisaris Independen, dan Profitabilitas*Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh
23.	Lustina Rima Masurroch (2020)	<ul style="list-style-type: none"> ● Profitabilitas ● Leverage ● Komisaris Independen ● Ukuran Perusahaan ● Intensitas Modal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leverage dan Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan ● Profitabilitas, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Scott (2015), salah satu motif manajemen pendapatan/laba adalah motif pajak. Perpajakan adalah salah satu alasan utama perusahaan menggunakan cadangan untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Salah satu karakteristik manajemen hasil adalah minimisasi laba (penurunan pendapatan) dengan mengurangi laba dan mencapai laba minimum yang *dinyatakan*. Perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah.

Penghindaran Pajak/ *Tax avoidance* (Siregar & Widyawati, 2016) merupakan upaya perusahaan untuk menghemat pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui jalur hukum, penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah eksploitasi hukum atau kerangka masalah pajak, yang merupakan tindakan hukum memanfaatkan celah pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang masih harus dibayar.

Manajemen laba sebagai tindakan manajer untuk memilih kebijakan atau aturan akuntansi yang memengaruhi laba pelaporan keuangan (Scott, 2015).

Manajemen hasil adalah tindakan memprioritaskan kepentingan pribadi manajer untuk memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraan manajer dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan. Informasi perusahaan yang sesuai yang disimpan oleh administrator digunakan untuk memungkinkan tindakan manajemen hasil dilakukan. Ada beberapa insentif untuk mendorong manajemen pendapatan. Yaitu, motif pajak, pergantian CEO, IPO, dan motif pasar modal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2015) yang menghasilkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti manajemen melakukan manajemen laba untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1 : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Kehadiran komite dapat meningkatkan pengawasan kinerja direksi, tetapi semakin banyak jumlah anggota independen, semakin ketat pengawasan manajemen. Pengawasan yang lebih ketat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan lebih hati-hati dan menjalankan bisnis secara transparan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak/tax avoidance.

Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi persentase dewan komisaris independen maka semakin banyak yang tidak ada kaitannya dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah (Feranika, 2016)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak, dan proporsi komisaris independen berdampak buruk pada praktik penghindaran pajak (Diantari & Ulupui, 2016) dan (Alam, 2019). Jumlah agen komisi di perusahaan yang cocok dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif.

Penelitian (Asri & Suardana, 2016), (Diantari & Ulupui, 2016), (Adrisa, 2018), dan (Rista & Mulyani, 2019) membuktikan komite audit mempunyai pengaruh

negatif dengan penghindaran pajak. Peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena semakin banyaknya keberadaan komite audit dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi

Rahmadani (2020) Perusahaan akan berupaya menekan pajak yang dibayarkan dengan menghindari pajak semaksimal mungkin. Manajemen sengaja menghindari pajak dengan meningkatkan biaya melalui penerapan kebijakan dan pedoman akuntansi tertentu, yang mengakibatkan pengurangan laba yang dilaporkan.

Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan menurunkan laba, yang dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba. Namun, pelaporan akan diawasi dengan komite audit. Komite audit mendukung dewan komisaris dalam memantau penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Puspitaningrum *dalam* Anggraini et al, 2019). Anggraini et al (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak hanya memantau, namu juga berperan penting menjamin

kualitas pelaporan keuangan dengan menjaga keefektifan dari pengendalian internal yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

H4: Komite Audit memperlemah hubungan antara Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.5 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi

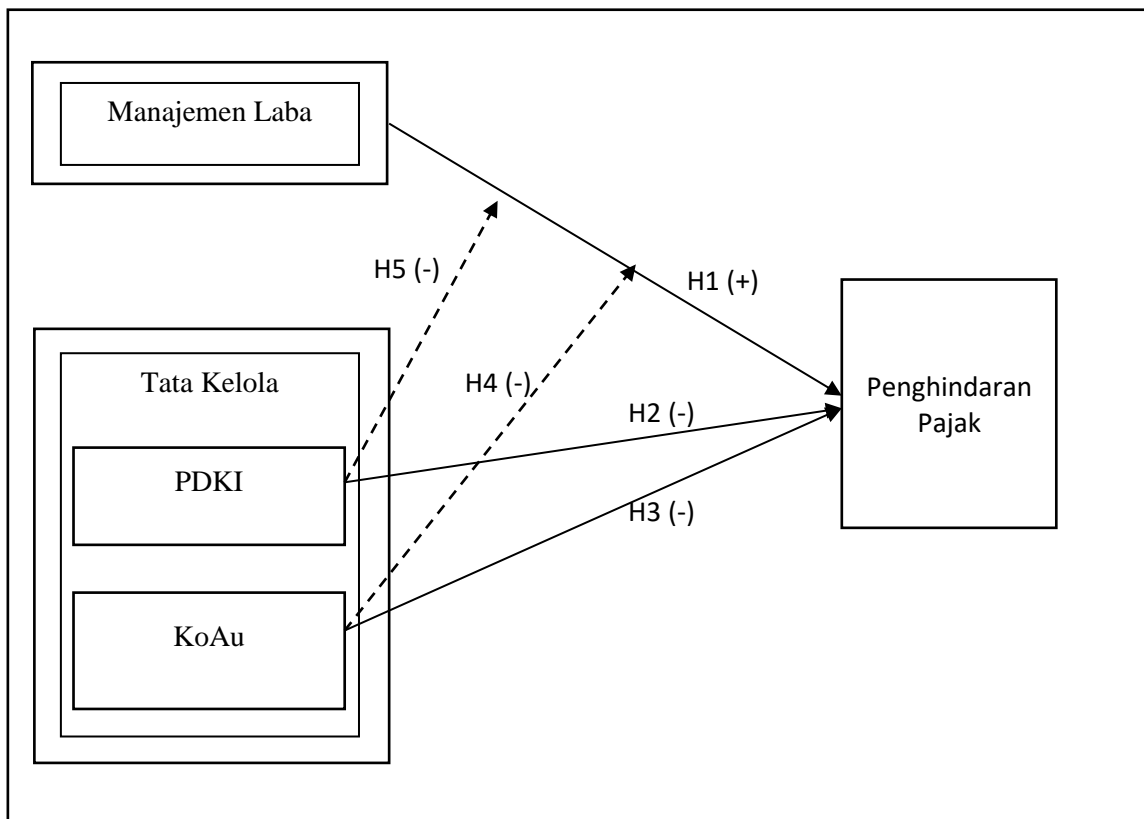
Menurut teori keagenan, Komisi adalah badan pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Ariawan & Setiawan (2017) berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan menggabungkan eksekutif independen yang memiliki kemampuan untuk memantau kinerja dan mengelola operasi perusahaan. Semakin tinggi persentase komisaris independen maka semakin besar pengawasan manajemen perusahaan atas pelaporan beban pajak perusahaan, sehingga kehadiran panel komisaris independen meminimalkan upaya penghindaran pajak perusahaan melalui penggunaan aset tetap.

Pengawasan yang lebih ketat dapat memengaruhi sikap manajemen, karena manajer cenderung lebih berhati-hati tentang semua keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, karena lebih banyak pengawasan dalam organisasi meningkat. Dewi & Noviari, 2017).

H5: Proporsi Dewan Komisaris Independen memperlemah hubungan antara Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.4 Rerangka Penelitian

Hal ini didasarkan pada tinjauan literatur yang dibahas dan penjelasan dari peneliti sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen pendapatan, persentase anggota independen, dan komite audit. Sedangkan variabel terikatnya adalah penghindaran pajak. Variabel penyesuaian adalah kontribusi Komite Independen dan Komite Audit. Rerangka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Subjek survei ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Manufaktur dipilih karena, menurut kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Ditjen Pajak, sebagian besar kegiatan manufaktur tercatat di BEI, dan manufaktur merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, jumlah produsen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cukup banyak untuk dijadikan sampel survei. Dengan menggunakan produsen yang terdaftar di BEI, peneliti berharap mendapatkan hasil yang tepat dan akurat.

Cara yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel yang memperhitungkan kriteria tertentu (*judgement sampling*) dari objek agar diperoleh sampel yang representatif.

Penetapan kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dan tidak *delisting* selama masa penelitian.
2. Perusahaan manufaktur yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 2016-2019 berhubungan dengan variabel penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah.

4. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya positif atau tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Sehingga data dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan lalu diolah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2019 yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data dalam penelitian ini berasal dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BEI DIY), website BEI (www.idx.co.id), website IDN Financials (www.idnfinancials.com), dan website perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah manajemen laba.

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak/*Tax avoidance* adalah kegiatan hukum dengan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum perpajakan (Santoso & Rahayu, 2013). Dewi & Sari (2015) menjelaskan bahwa penghindaran pajak diimplementasikan dalam strategi di bidang perpajakan yaitu legal. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur sebagai variabel dependen dengan CASH ETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan, pemisahan antara pengeluaran kas dari pengeluaran pajak dan laba sebelum pajak (Barid & Wulandari, 2021). Rumus perhitungan untuk CASHETR adalah sebagai berikut.

$$\text{Cash ETR} = 1 - \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar Cash ETR maka mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

3.3.2.1 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah semua tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk memengaruhi laba sesuai dengan tujuannya (Supriyono, 2018). Manajemen laba dikenalkan oleh Jones (1991) dan dimodifikasi oleh Dechow et al (1995) (Rohmaniyah & Khanifah, 2018). Manajemen laba dihitung berdasarkan nilai akrual.

Cara menghitung manajemen laba (Jones, 1991):

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flows\ From\ Operations$$

Langkah II: Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left[\frac{1}{TA_{t-1}} \right] + b_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Langkah III: Menghitung nilai *nondiscretionry total accrual* (NDA)

$$NDA_{i,t} = b_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t}} \right] + b_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t}} \right] + b_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t}} \right]$$

Langkah IV: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DAC)

$$DAC = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan : $TAC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i periode t.

TA_{t-1} = Total aset untuk perusahaan i periode t-1.

$Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan i periode t.

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t.

$NDA_{i,t}$ = *Nondiscretionry accrual* pada tahun t.

$TR_{i,t}$ = Perubahan piutang dagang perusahaan i periode t.

b = *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total akrual.

DAC_t = discretionary accruals perusahaan pada periode t.

3.3.2.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris independen terdiri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Komisaris independen diukur dengan perbandingan persentase jumlah komisaris independen dan jumlah anggota komite (Arifani, 2012).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.3.2.3 Komite Audit

Komite Audit adalah komite tambahan yang dibentuk oleh komite dan membantu dalam pengawasan tata kelola perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan memberikan pendapat kepada Komite Audit. Masalah dengan kebijakan keuangan perusahaan, akuntansi dan pengendalian internal. Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota yang dipilih dari agen independen dan pihak di luar emiten atau perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Sebaliknya, semakin besar jumlah komite audit, semakin rendah

kebijakan penghindaran pajak, dan semakin kecil jumlah komite audit, semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak (Sarra, 2017).

$$Komite\ Audit = \sum Komite\ Audit$$

3.4 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program Social Science Statistics Package (SPSS). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Alasan menggunakan alat analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas berganda terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2018).

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode pengorganisasian dan analisis data kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang teratur dari suatu kegiatan. Analisis deskriptif membantu menjelaskan data dan gambaran besar sampel yang dikumpulkan serta memenuhi persyaratan sampel survei maksimum-minimum, *mean*, dan standar deviasi (Sugiyono, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji *asumsi* klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik. Untuk membuat model regresi tidak bias, atau untuk membuat model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), maka harus terlebih dahulu menguji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji penerimaan klasikal

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji varians tidak seragam (Sugiyono, 2018).

3.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi data yang normal dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menguji tingkat signifikansi. Artinya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika nilainya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Sugiyono, 2018).

3.4.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas dalam penelitian ini. Untuk uji multikolinearitas, hal ini dapat dikonfirmasi dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 maka model regresi terindikasi mengalami multikolinearitas, dan apabila nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 maka model regresi terbebas multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).

3.4.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linear untuk korelasi antara kesalahan kebisingan pada periode t dan kesalahan kebisingan pada periode sebelumnya $t-1$. Jika ada korelasi yang disebut masalah autokorelasi (Ghozali, 2018),

autokorelasi ini terjadi sebagai hasil penyelidikan yang berurutan dan konsisten. Dalam penelitian ini, uji Durbin-Watson dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (d) yang dihitung dengan nilai tabel Durbin-Watson yaitu batas atas (d_u) dan (d_L) batas bawah, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$d_L \leq d \leq d_u$
Tidak ada kolerasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.4.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji varians heterogeny/heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model dengan varians yang tidak seragam. Jika penyimpangan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut varians heterogen, dan jika berbeda disebut varians heterogen (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel (ZPRED)

dengan residual nya (SRESID). Dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* ZPRED dan SRESID dengan dasar analisis yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar lalu kemudian menyempit) maka diindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan *scatterplot* antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dan residual (SRESID) untuk mendeteksi ada tidaknya varians yang tidak seragam. Dengan menelaah pola tertentu pada scatter plot ZPRED dan SRESID berdasarkan analisis, yaitu jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik terdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terdapat varians yang heterogen. Sebaliknya, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, diperbesar, kemudian mengecil) menunjukkan terjadi dispersi tidak seragam.

3.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas berganda (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis regresi linear berganda menggunakan uji kepastian (R^2), uji tunggal (uji t), dan uji simultan (uji F) (Ghozali, 2018). Model regresi untuk penelitian ini yaitu:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1\text{EM} + \beta_2\text{PDKI} + \beta_3\text{KoAu} + e$$

Keterangan:

ETR	= Penghindaran Pajak / <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
EM	= <i>Earning Management</i> / Manajemen Laba
PDKI	= Proporsi Dewan Komisaris Independen
KoAu	= Komite Audit
e	= <i>error</i>

3.5.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi-variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan nilai *adjusted R-squared* karena variabel independen untuk penelitian ini lebih besar dari dua (Ghozali :2018) juga menyatakan bahwa penambahan variabel pada model dapat menambah atau mengurangi nilai *adjusted R-squared*. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin baik kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yang ada dalam penelitian ini secara individual untuk menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali : 2018)

Kriteria pengujian:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima maka berarti ada pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak maka berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.5.3 Uji Interaksi

Untuk menguji hubungan antara variabel *independen*, variabel *dependen*, variabel kontrol dan variabel *moderating* digunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Metode yang akan digunakan untuk regresi moderasi dalam penelitian ini adalah uji interaksi yang pengujiannya menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$\text{CETR} = \alpha_0 + \beta_1\text{EM} + \beta_2\text{PDKI} + \beta_4\text{EM*PDKI} + e$$

$$\text{CETR} = \alpha_0 + \beta_1\text{EM} + \beta_3\text{KoAu} + \beta_5\text{EM*KoAu} + e$$

Keterangan:

$$\text{CETR} = \text{Penghindaran Pajak / Tax Avoidance}$$

α = Konstanta

$\beta_1 \sim \beta_5$ = Koefisien Regresi

EM = Manajemen Laba / *Earning Management*

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

KoAu = Komite Audit

e = *error*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan dengan teori yang digunakan dan telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian melakukan analisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang kemudian dikembangkan menjadi rumusan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut dapat didukung atau sebaliknya tidak didukung.

4.1 Hasil Analisis Statistik

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Deskripsi obyek penelitian meneliti profil perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada 3 sektor yaitu industri dasar dan kimia, industry aneka, dan industri barang konsumsi serta mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara konsisten selama 4 tahun berturut turut, yaitu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sebanyak 125 perusahaan.

4.1.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang sampel data yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel adalah: penghindaran

pajak, manajemen pendapatan, komite audit, dan proporsi dewan komisaris independen.

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	500	-8,752	2,903	0,53971	0,93133
Manajemen Laba	500	-14,535	22,176	0,13047	1,70079
Proporsi Dewan Komisaris Independen	500	0,00	3,00	0,7052	0,41877
Komite Audit	500	0,00	5,00	2,9300	0,6244
Valid N (listwise)	500				

Nilai minimum variabel penghindaran pajak (CETR) adalah -8,752 atau -87,52%. Nilai maksimumnya adalah 2,903 atau 29,03%. Rata-rata variabel Penghindaran Pajak (CETR) adalah 0,53971 atau 53,97% dengan standar deviasi 0,93133. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komposisi penghindaran pajak perusahaan sampel adalah sebesar 53,97 persen.

Nilai minimum variabel Manajemen Laba (EM) adalah -14,535 atau -1453,5%. Nilai maksimumnya adalah 22,176 atau 2217,6%. Rata-rata variabel Manajemen Laba (EM) adalah 0,13047 atau 13,05% dengan standar deviasi 1,70079. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komposisi Manajemen Laba perusahaan sampel adalah sebesar 13,05 persen.

Nilai minimum variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah 0,000 atau 0%. Nilai maksimumnya adalah 3,00 atau 300%.

Rata-rata variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) adalah 0,7052 atau 70,52% dengan standar deviasi 0,41877. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komposisi Manajemen Laba perusahaan sampel adalah sebesar 70,52 persen di atas aturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimana minimal 30% (tiga puluh persen).

Nilai minimum variabel Komite Audit (KomAu) adalah 0,000 atau 0%. Nilai maksimumnya adalah 5,000 atau 500%. Rata-rata variabel Komite Audit (KomAu) adalah 2,9300 atau 29,3% dengan standar deviasi 0,6244. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komposisi Komite Audit perusahaan sampel adalah sebesar 29,3 persen.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik masing-masing variabel yang diuji dalam penelitian ini.

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi data yang normal dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menguji tingkat signifikansi. Artinya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, dan jika nilainya $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Sugiyono, 2018).

Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		500
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,00000000
	Std. Deviation	0,177946512
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,040
Kolmogorov-Smirnov Z		1,242
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada tabel 4.2 yaitu dengan uji *kolmogorov-smirnov* adalah 1,242 dan diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 0,091, nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan bukan data yang berdistribusi tidak normal. Dengan hasil ini maka menjadi dasar untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas dalam penelitian ini. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menguji faktor toleransi dan *Variabel Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel. Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk mengkonfirmasi adanya multikolinieritas adalah toleransi $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,125	8,606		,479	,633		
Manajemen Laba	4,616	2,251	,019	,205	,838	,977	1,024
Proporsi Dewan Komisaris Independen	8,737	4,096	,002	,021	,983	,970	1,031
Komite Audit	-3,061	2,821	-,099	-1,085	,280	,983	1,018

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ada pada tabel 4.3 di atas maka dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut, nilai *tolerance* Manajemen Laba sebesar $0,977 \geq 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,024 \leq 10$. Dan sedangkan nilai *tolerance* Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar $0,970 \geq 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,031 \leq 10$. Dan nilai *tolerance* Komite Audit sebesar $0,983 \geq 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,018 \leq 10$. maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel model regresi tidak terdapat multikolinieritas sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis berikutnya.

4.1.2.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (d) yang dihitung dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan membandingkan nilai durbin Watson hitung (d) dengan nilai durbin watson tabel, adalah batas bawah (dL) sebesar 1.65924 dan batas atas (du) Sebesar 1.75740. Berdasarkan hasil olah data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,805 ^a	,484	,571	1,84385E12	1,784

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Proporsi Dewan Komisaris Indepenen, dan Komite Audit

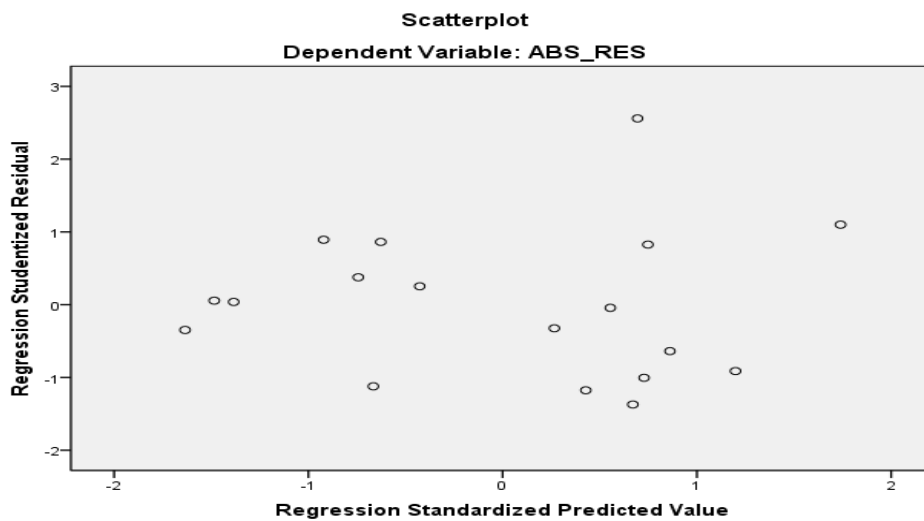
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi Durbin-Watson pada tabel 4.4, didapatkan nilai d sebesar 1,784. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka dihitung terlebih dahulu $(4-d)$, yaitu $(4-1,784) = 2,216$. Hasil perhitungan $(4-d)$ menunjukkan hasil lebih dari batas atas (dU). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dari variabel yang diuji.

4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji varians tidak seragam dilakukan untuk melihat apakah terdapat varians varians dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, itu disebut varians heterogen, dan jika berbeda, itu dirujuk. Sebagai dispersi yang tidak seragam. Perhitungan varians tidak seragam dapat dilakukan dengan menggunakan banyak model. Salah satunya adalah plot pencar antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dan residual (SRESID).



Gambar 4. 1 Diagram Scatter Plot

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.1 di atas maka model regresi dikatakan baik hal ini dibuktikan dengan tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang

melebar lalu kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.2.5 Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan mengetahui variabel Manajemen Laba, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,125	8,606E11		12,479	,633
Manajemen Laba	4,616	2,251E10	,019	2,721	,008
Proporsi Dewan Komisaris Independen	-8,737	4,096E11	-,002	2,021	,010
Komite Audit	-3,061	2,821E11	-,099	1,850	,028

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: data diolah (2022)

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{EM} + \beta_2\text{PDKI} + \beta_3\text{KoAu} + e$$

$$\text{CETR} = 4,125 + 4,616 \text{ EM} - 8,737 \text{ PDKI} - 3,061 \text{ KoAu} + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 tersebut maka dapat di simpulkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

1. Manajemen Laba (EM)

Nilai koefisien Manajemen Laba untuk variabel X_1 sebesar 4,616 menggambarkan bahwa Manajemen Laba mempunyai pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya apabila Manajemen Laba ditingkatkan dan diperbaiki satu satuan maka akan memengaruhi kenaikan *Tax Avoidance* sebesar 4,616. Dan berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis antara manajemen laba terhadap *Tax Avoidance*. Terlihat bahwa pada kolom t-hitung dan kolom Sig. (Signifikan) pada tabel *Coefficients*, didapat nilai t-hitung sebesar $2,721 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.65714. dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 > 0,008$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **didukung**, artinya Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Nilai koefisien PDKI untuk variabel X_2 sebesar -8,737. Menggambarkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya apabila Proporsi Dewan Komisaris Independen ditingkatkan dan diperbaiki satu satuan maka akan memengaruhi Penurunan *Tax Avoidance* sebesar -8,737. Dan selanjutnya hasil pengujian hipotesis antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. Terlihat bahwa pada kolom t-hitung dan kolom Sig. (Signifikan) pada tabel *Coefficients*,

didapat nilai t-hitung sebesar $2,021 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.65714 . dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 > 0,010$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **didukung**, artinya Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3. Komite Audit (KoAu)

Nilai koefisien Komite Audit untuk variabel X_3 sebesar $-3,061$. Menggambarkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*. Artinya apabila Komite Audit ditingkatkan dan diperbaiki satu satuan maka akan memengaruhi penurunan *Tax Avoidance* sebesar $-3,061$. Dan berikutnya adalah hasil pengujian hipotesis antara Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Terlihat bahwa pada kolom t-hitung dan kolom Sig. (Signifikan) pada tabel *Coefficients*, didapat nilai t-hitung sebesar $1,850 > t\text{-tabel}$ sebesar 1.65714 . dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 > 0,028$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **didukung**, artinya Komite Audit berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.1.2.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang digunakan pada penelitian untuk mengukur variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1 dimension	,711 ^a	,506	,615	1,801E12

a. Predictors: (Constant), Manajemen Laba, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji determinasi *R Square* pada tabel 4.6 Menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,506. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 50,6%, dan sisanya sebesar 49,4% dijelaskan oleh variabel diluar Manajemen Laba, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

4.1.2.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana variabel independen secara individual dapat memengaruhi variabel dependen (uji-t), dan probabilitas signifikansi (sig-t) dari penelitian ini adalah 0,05, pengambilan keputusan.

Hasil persamaan regresi untuk masing-masing variabel survei berdasarkan Tabel 4.4. Uji-t pada tabel menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini secara individual menjelaskan variasi variabel dependen, dan menyimpulkan bahwa:

1. Nilai probabilitas Manajemen Laba berdasarkan hasil uji-t pada tabel di atas ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,008 \leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh variabel manajemen laba secara signifikan dengan variabel *tax avoidance*.
2. Nilai probabilitas PDKI berdasarkan hasil uji-t pada tabel di atas ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,010 \leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima maka berarti ada pengaruh variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dengan variabel *tax avoidance*.
3. Nilai probabilitas Komite Audit berdasarkan hasil uji-t pada tabel di atas ditemukan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,028 \leq 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima maka artinya ada pengaruh variabel Komite Audit berpengaruh signifikan dengan variabel *tax avoidance*.

4.1.2.8 Uji Interaksi

Uji interaksi menguji hubungan antara variabel *independen*, variabel *dependen*, dan variabel *moderating* digunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4. 7 Koefisien Moderasi Hipotesis 4

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,980	1,645		-3,027	,003
Manajemen Laba	3,690	6,631	,150	3,556	,046
Manajemen Laba*Komite Audit	-4,866	8,952	-,147	-5,544	,006

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.7 nilai moderasi yang diperoleh nilai signifikansinya adalah sebesar $0,006 \leq 0,05$ dan nilai *unstandardized coefficients* sebesar -4,866, H_0 ditolak dan H_a diterima dan bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **didukung**, artinya komite audit memperlemah manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. 8 Koefisien Moderasi Hipotesis 5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,823	1,621		-2,976	,004
Manajemen Laba	-2,413	1,753	-,098	-5,138	,001

Manajemen Laba*Prop orsi Dewan Komisaris Independen	-9,186	5,901	-,111	-5,156	,001
-----------------------------------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 nilai moderasi yang diperoleh nilai signifikansinya adalah sebesar $0,001 \leq 0,05$, dan nilai *unstandardized coefficients* sebesar -9,186, H_0 ditolak dan H_a diterima dan bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis **didukung**, artinya proporsi dewan komisaris independen memperlemah manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien manajemen laba sebesar 4,616 artinya variabel manajemen laba berpengaruh positif, nilai t-hitung sebesar $2,721 > t\text{-tabel } 1,65714$ dan signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ yang artinya manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah dan Firmansyah (2015) yang menghasilkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti manajemen melakukan manajemen laba untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba

yang dilaporkan melalui penggunaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba (*income decreasing*) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.

4.2.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien PDKI adalah -8,737. Artinya variabel PDKI berpengaruh negatif, t hitung variabel PDKI sebesar 2,021 > t tabel sebesar 1,65714, dan signifikansi $0,10 < 0,05$. Hal ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran variabel pajak oleh Komisi Independen. Studi tersebut menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak, dan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak (Diantari dan Ulupui, 2016) dan (Alam, 2019). Ini cocok. Banyaknya agen komisi dalam suatu perusahaan dapat mencegah praktik penghindaran

pajak. Ini juga didukung oleh pernyataan Feranika (2016) yang menyatakan bahwa Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi persentase dewan komisaris independen maka semakin banyak yang tidak ada kaitannya dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kinerja dewan, tetapi semakin banyak jumlah anggota independen, semakin ketat pengawasan manajemen. Pengawasan yang lebih ketat memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan lebih hati-hati dan menjalankan bisnis secara transparan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien review board sebesar -3,061, t hitung variabel review board sebesar 1,850 > t tabel sebesar 1,65714, dan signifikansi sebesar 0,028 < 0,05. Artinya variabel review board berpengaruh negatif dan signifikan. Ada variabel penghindaran pajak. Ini termasuk investigasi (Asri dan Suardana, 2016), (Diantari dan Ulupui, 2016), (Adrisa, 2018), dan (Rista dan Mulyani, 2019) yang menunjukkan bahwa Komite Audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Ini cocok. Peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan meminimalkan praktik penghindaran pajak perusahaan karena bertambahnya jumlah komite audit perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah informasi keuangan yang

diterbitkan oleh emiten atau perusahaan tercatat kepada publik dan/atau badan pengatur. Ini termasuk pelaporan keuangan, prakiraan, dan laporan lain yang terkait dengan informasi keuangan perusahaan. Dengan memperkuat pengawasan manajemen perusahaan, kami akan mencapai informasi berkualitas tinggi dan kinerja yang efektif.

4.2.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi

Adanya komitmen organisasi dalam hal ini komite audit (*variabel moderating*) dapat memperlemah hubungan manajemen laba terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 dan nilai koefisien sebesar -4,866 bernilai negatif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Anggraini (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak hanya memantau, namun juga berperan penting menjamin kualitas pelaporan keuangan dengan menjaga keefektifan dari pengendalian internal yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan menurunkan laba, yang dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba. Namun, pelaporan akan diawasi dengan komite audit. Komite audit mendukung dewan komisaris dalam memantau penyusunan laporan keuangan, mekanisme pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Puspitaningrum *dalam* Anggraini, 2019). Rahmadani (2020) perusahaan

akan berusaha semaksimal mungkin agar pajak yang dibayarkan rendah dengan melakukan penghindaran pajak. Manajemen sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui penggunaan metode dan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba yang dilaporkan lebih kecil.

4.2.5 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi

Adanya Proporsi Dewan Komisaris Independen (*Variabel Moderating*) akan dapat memperlemah hubungan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien sebesar -9,186 bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Ariawan dan Setiawan (2017) berpendapat bahwa mekanisme corporate governance menggabungkan eksekutif independen yang memiliki kemampuan untuk memantau kinerja dan mengelola operasi perusahaan. Semakin tinggi persentase komisaris independen maka semakin besar pengawasan manajemen perusahaan atas pelaporan beban pajak perusahaan, sehingga kehadiran panel komisaris independen meminimalkan upaya penghindaran pajak perusahaan melalui penggunaan aset tetap. Pengawasan yang lebih ketat dapat memengaruhi sikap manajemen, karena manajer cenderung lebih berhati-hati dalam semua keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan

dengan pembayaran pajak, karena semakin banyak pengawasan dalam organisasi yang meningkat. Dewi dan Noviari, 2017).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang membahas mengenai pendelegasian tugas antara prinsipal (*stakeholder*) keagenan (perusahaan). Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan beberapa variabel seperti manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Diharapkan variabel – variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019 . Data penelitian ini berasal dari data sekunder yang di dapat dari laporan keuangan perusahaan go public sebanyak 125 perusahaan pada empat periode dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, sehingga didapatkan jumlah sampel (n) sebanyak $125 \times 4 = 500$ sampel .

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien manajemen laba sebesar 4,616, nilai t-hitung sebesar 2,721 > t-tabel 1.65714 serta signifikansi sebesar 0,008 artinya variabel manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*.
2. Nilai koefisien PDKI sebesar -8,737, nilai t-hitung sebesar 2,021 > t-tabel sebesar 1.65714 dan nilai signifikan sebesar 0,010 artinya variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*.

3. Nilai koefisien komite audit sebesar -3,061, nilai t-hitung sebesar 1,850 > t-tabel sebesar 1.65714 dan nilai signifikansi sebesar 0,028 artinya variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*.
4. Adanya komitmen organisasi dalam hal ini Komite Audit (*Variabel Moderating*) dapat memperlemah hubungan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 dan nilai koefisien sebesar -4,866 bernilai negatif.
5. Adanya Proporsi Dewan Komisaris Independen (*Variabel Moderating*) akan dapat memperlemah hubungan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien sebesar -9,186 bernilai negatif.

5.2 Implikasi

1. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pemerintah sudah menyediakan aturan – aturan yang menurut peneliti sudah baik, diharapkan pemerintah dapat mempertahankan dan menambahkan stimulus kepada perusahaan go public agar dapat meminimalisir penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan pajak yang masuk ke Indonesia. Adanya faktor internal ataupun eksternal itu sendiri tidak dapat 100% dihilangkan. Keterbukaan informasi diharapkan dapat selalu menjadi prioritas terdepan oleh pemerintah,

agar kerugian baik material ataupun non material dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dapat diminimalisir

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini, bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih teliti jika akan melakukan investasi dalam memilih perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memang bukan satu – satunya tolok ukur dari sebuah performa perusahaan, karena bisa jadi tidak tepatnya pelaporan keuangan disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun secara fundamental, jika perusahaan tepat waktu dalam pembayaran pajak, setidaknya masyarakat dapat mempertimbangkan keputusan dalam melakukan investasi.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor– faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu akuntansi, dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah bukti empiris faktor – faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

5.3 Saran

Atas dasar keterbatasan penelitian, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian dengan meneliti perusahaan dengan lingkup yang lebih luas serta menambahkan faktor yang lain seperti

corporate governance (variabel lainnya), struktur kepemilikan, *thin capitalization*, kualitas audit, dan penggunaan derivatif keuangan sehingga hasil penelitian lebih tepat.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini belum memasukkan faktor-faktor lain yang diprediksi dapat atau tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan misalnya kualitas internal audit, struktur kepemilikan atau *corporate governance* lainnya.
2. Hasil penelitian tidak bisa melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang dan belum mewakili dari semua kategori perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Miftah Muhammad dan Ellen, Rusliati. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan*. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 11(2), 80–87. <http://dx.doi.org/10.23969/jrbm.v11i2.1256>
- Adrisa, N. (2018). *Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. STIE Indonesia Banking School, 1–17.
- _____. (2019). *Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderating*. Doctoral dissertation: STIE Indonesia Banking School.
- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Anabella, C, N., dan Wijaya, H. (2022). *Pengaruh Komisaris Independen Dan Demografi Komisaris Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan IPO Pada Tahun 2015-2019*. *FORUM EKONOMI*, 24 (1) 2022, 144-154 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi*. In *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 1).
- Ardianti, P. N. H. (2019). *Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831-1859.

- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 16(1), 72-100.
- Astari, A. A. M. R., & Suryanawa, I. K. (2017). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Laba*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 20, 290–319.
- Badoa, M. E. C. (2020, April). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-55).
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). *Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>.
- Chen, Y., Sains, U., & Nasional, Y. (2020). *Manajemen Laba dan Karakteristik Pengaruh Komite Audit , Komisaris Independen : Bukti Dari*. 21(2), 569–587.
- Christy, J., & Subagyo, S. (2019). *Pengaruh Firm Size, Sales Growth, Dan Roa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi.
- Dechow, et. al. (1995). *Detecting Earnings Management*. The accounting Review Vol.70 No.2
- Dewi, G. A., & Sari, M. M. (2015). *Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 50-67.
- Dewi, L. K., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). *Pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*. In SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 1).
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. E-Jurnal Akuntansi, 21(2), 882-911.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 16(1), 702-732.

- Eksandy, A. (2017). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. *Competitive*, 1(1), 1-20.
- Feranika, F. (2016). *Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Non Performing Loan, Likuiditas Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Perbankan Go Public Di Bei* (Doctoral Dissertation, Stie Perbanas Surabaya).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 1-12.
- Hariseno, P. E., & Pujiono. (2021). *Pengaruh Praktik Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 110–111.
- Henny, H. (2019). *Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 36-46.
- <http://nasional.kontan.co.id>. Dilaporkan melakukan penghindaran pajak, Bentoel angkat bicara. Diakses 21 Maret 2022
- Jones, J. J. (1991). *Earnings Management During Import Relief Investigations*. *Journal Of Accounting Research*, Vol 29, No.2 1991, p.193 – 228.
- Kusuma, Palupi Ayu. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pt Razza Prima Trafo Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lestari, N., & Ningrum, S. (2018). *Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi*. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 3(1), 99-109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1305187>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance*. *INOVASI*, 17(1), 82-93.

- Melisa, M. & Tandean, V. A. (2015). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 8, (No.1).
- Nugraheni, Arfenta Satria & Pratomo, Dudi. (2018). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. E-Proceeding of Management. Vol. 5(2), hal: 2227.
- Nurchayono, N. (2021). *Pengaruh Tax Avoidance, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Komite Audit*. Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas ..., 2(1). <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/jimat/article/view/1329>
- Nurhidayah, V. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Di Bei*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), 132–142. <http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/426>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK-33-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK-33-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. *Ojk.Go.Id*, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK-PERIZINAN-FINAL-F.pdf>
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2015). *Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Politeknik Keuangan Negara. STAN Indonesia.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). *Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak*. *Keberlanjutan*, 2(1), 431-459.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135-142.
- Rista, B., & Mulyani, S. D. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Peran Komite Audit sebagai Moderasi*. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-45).
- Rohmaniyah, A., & Khanifah, K. (2018). *Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 9–15. <https://doi.org/10.31942/akses.v13i1.3225>
- Rosyada, R. A. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014–2016.
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning. (2013). *Corporate Tax Management. Observation and Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.
- Sarra, H. D. (2017). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. *Competitive*, 1(1), 63-86
- Scott, R. William. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Sembiring, Y. C., & Fransiska, A. (2021). *Pengaruh Return on Assets dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019*. *JRAK*. Vol. 7. No. 2, 13.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance*. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114-133.
- Sibarani, C. (2018). *Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi : Semarang.

- Sinaga, C. H. and I. M. S. Suardikha (2019). *Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 27.1: 1-32.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Sofiya, H. (2019). *Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)*. Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja.
- Subagiastara, K., Adnyana, N, K., dan Arizona, P., E. (2016). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- _____. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)*. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.
- Supriyono, R. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Tandilino, Albertus. (2016). *Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Himbauan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan final Sektor UMKM di Kota Kendari*. Kendari : PPs UHO
- Tang, T. and M. Firth. (2011). *Can Book Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China*. *The International Journal of Accounting*.
- Tendean. (2016). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U) ke-2 Tahun 2016.
- Thesarani, Nurul Juita. (2017). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajeria, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Struktur Modal*. *Jurnal Nominal*, Vol. 6.No. 2.Hal.-

- Wardani, D. K., Dewanti, W. I., & Permatasari, N. I. (2017). *Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. *Sumber*, 1(7), 1-339.
- Wibawa, A., Wilopo, W., & Abdillah, Y. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan terdaftar di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014)*. (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Wijayani, R. D. (2016). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, Dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 181-192.
- Wirakusuma, D. K. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktek Manajemen Laba*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Yunawati, Sri. (2021). *Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. *Akpem: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 14–20. Retrieved from <https://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/view/949>